



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010 - 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 – 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 11. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
 12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
 15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:

PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 229);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten

Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 230);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 183);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 210);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010 – 2015;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 228);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010 – 2015.

Pasal 1

Indikator kinerja merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2010 -2015.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 – 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh SKPD dan disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 4





Inspektorat Kabupaten Luwu Utara wajib :

- a. melakukan review atas capaian kinerja Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

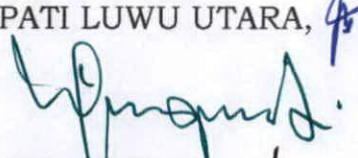

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Luwu Utara.


PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 22 JANUARI 2013

BUPATI LUWU UTARA, 
ARIFIN JUNAIDI 

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 22 JANUARI 2013

SEKRETARIS DAERAH,



MUDJAHIDIN IBRAHIM

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 8 TAHUN 2013
 TENTANG :
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN LUWU UTARA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010-2015

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI TAHUN 2010
1	2	3	4
DINAS KESEHATAN			
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan berorientasi publik	Laporan Keuangan tepat waktu sesuai SAP	Tepat/tidak	Tepat
Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik	Status laporan kinerja kategori baik	A, B, C, D	D
Meningkatnya ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	Angka Harapan Hidup	Tahun	71.34
	Persentase Cakupan Rawat Jalan	%	21.73
	Persentase Cakupan rawat inap	%	1.95
	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	76.85
	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu, Poskesdes, Polindes per satuan penduduk	Per 1.000 penduduk	0.53
	Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	%	100
	Persentase sarana kesehatan dengan kemampuan laboratorium kesehatan	%	70
Menurunnya jumlah kasus kesakitan dan kematian akibat penyakit dan bencana	Cakupan penderita DBD yang ditangani	%	100
	Cakupan penemuan penderita diare	%	100
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit AFP per 100.000 penduduk < 15 tahun	%	5.61
	Cakupan penemuan penderita Pneumonia Balita	%	100
	Prevalensi HIV-AIDS per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	1.55
	Persentase penemuan penderita TBC BTA Posotif	%	50
	Angka kesembuhan penderita TB Paru BTA Positif	%	83.14
	Cakupan desa UCI	%	93.57
	Annual Parasite Insiden (API)	Per 1.000 penduduk	5.06
	Penderita Kusta yang selesai berobat (RFT)	%	66.67

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI TAHUN 2010
1	2	3	4
Meningkatnya status gizi masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin	Persentase gizi buruk pada balita	%	100
	Persentase gizi kurang pada balita	%	6.24
	Persentase kecamatan bebas rawan gizi	%	12.94
	Persentase Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	18.18
	Persentase bayi umur 6-59 bulan mendapat kapsul Vitamin A	%	100
	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	%	87.91
	Persentase balita yang ditimbang berat badannya	%	100
	Persentase Balita yang naik berat badannya	%	48.97
	Persentase balita yang mendapat ASI eksklusif	%	57.27
Meningkatnya status kesehatan masyarakat rentan terutama ibu, bayi, anak dan usia lanjut	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	Per 1.000 KH	49.79
	Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	Per 1.000 KH	16.91
	Jumlah kematian Ibu	Kelahiran Hidup	5
	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	%	81.51
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	90.03
	Cakupan pelayanan nifas	%	90.05
	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100
	Cakupan kunjungan bayi	%	91.43
	Cakupan pelayanan anak balita	%	77.24
	Persentase ibu hamil yang mendapat tablet Fe	%	81.51
	Cakupan peserta KB aktif	%	75.15
	Cakupan pelayanan kesehatan pra usila dan usia lanjut	%	24.92
Meningkatnya kualitas penyehatan lingkungan	Persentase keluarga yang memiliki akses air bersih	%	68
	Cakupan jamban keluarga memenuhi standar kesehatan	%	45.38
	Cakupan SPAL memenuhi syarat kesehatan	%	35.36
	Persentase tempat-tempat umum (TTU) memenuhi syarat kesehatan	%	60.8

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI TAHUN 2010
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan yang professional dan dimanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 1.000 penduduk	33.89
Menata system informasi Kesehatan dan pengembangan IPTEK Kesehatan	Jumlah dokumen profil yang tersusun	Per 1.000 penduduk	0.12
	Rasio apoteker per satuan penduduk	Per 1.000 penduduk	0.02
	Rasio bidang per satuan penduduk	Per 1.000 penduduk	0.46
	Rasio perawat per satuan penduduk	Per 1.000 penduduk	0.98
	Rasio ahli gizi per satuan Penduduk	Per 1.000 penduduk	0.05
Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan secara merata dan bermutu	Ketersediaan obat PKD dan reagen sesuai kebutuhan	Per 1.000 penduduk	0.06
	Produk obat dan makanan memenuhi syarat kesehatan	Persen	0.24
	Pengembangan tanaman obat tradisional	% Desa	141.56
Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan yang berbasis masyarakat	Cakupan desa siaga aktif	persen	100
	Persentase posyandu purnama dan mandiri	persen	-
	Rasio Posyandu per satuan balita	Per 1.000 balita	67.25
Meningkatnya upaya promosi di bidang kesehatan	Persentase rumah tangga yang ber-PHBS	%	29.31
	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	15.62
	Terbentuknya komitmen kawasan tanpa rokok	desa	37.44
		Paket	68.14
Menata system informasi kesehatan dan pengembangan IPTEK kesehatan	Jumlah SIK yang dibangun	Paket	-
	Jumlah dokumen profil yang tersusun	dokumen	-
Menata kualitas perencanaan dan manajemen pembangunan kesehatan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Dokumen	13
	Jumlah kecamatan dan puskesmas yang terpantau program pembangunan kesehatan	Puskesmas	4
	Jumlah puskesmas yang punya sertifikat ISO 9001:2008	Puskesmas	12
	Meningkatnya administrasi pelayanan UPTD Dinkes	Unit	-
	Meningkatnya kualitas administrasi		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI TAHUN 2010
1	2	3	4
DINAS PERTANIAN			
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan berorientasi publik	Laporan Keuangan tepat waktu sesuai SAP	Tepat/tidak	tepat
Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik	Status laporan kinerja kategori baik	A, B, C, D	D
Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan	Luas Tanaman Pangan		
	Luas Tanam Padi	Ha	33.906
	Luas Tanam Jagung	Ha	17.3
	Luas Tanam Kedelai	Ha	350
	Luas Tanam Kacang Tanah	Ha	310
	Luas Tanam Kacang Hijau	Ha	50
	Luas Tanam Ubi Jalar	Ha	330
	Luas Tanam Ubi Kayu	Ha	510
	Luas Panen Tanaman Pangan		
	Luas Panen Padi	Ha	33.627
	Luas Panen Jagung	Ha	17.244
	Luas Panen Kedelai	Ha	350
	Luas Panen Kacang Tanah	Ha	300
	Luas Panen Kacang Hijau	Ha	42
	Luas Panen Ubi Jalar	Ha	327
	Luas Panen Ubi Kayu	Ha	-
	Produksi Tanaman Pangan		
	Produksi Padi	Ton	176.205
	Produksi Jagung	Ton	79.322
	Produksi Kedelai	Ton	521,5
	Produksi Kacang Tanah	Ton	300
	Produksi Kacang Hijau	Ton	45,6
	Produksi Ubi Jalar	Ton	2.812,2
	Produksi Ubi Kayu	Ton	5.55
	Produktivitas Tanaman Pangan		
	Produktifitas Padi	Ton/Ha	5,24
	Produktifitas Jagung	Ton/Ha	4,6
	Produktifitas Kedelai	Ton/Ha	1,49
	Produktifitas Kacang Tanah	Ton/Ha	1
	Produktifitas Kacang Hijau	Ton/Ha	0,95
	Produktifitas Ubi Jalar	Ton/Ha	8,6
	Produktifitas Ubi Kayu	Ton/Ha	11,1
Meningkatnya produksi tanaman Hortikultura	Luas Tanam Tanaman Buah-Buahan		
	Luas Tanam Durian	Ha	1.445
	Luas Tanam Rambutan	Ha	1145,9
	Luas Tanam Jeruk Siam	Ha	1.778,4
	Luas Tanam Pisang	Ha	100,5

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI TAHUN 2010
1	2	3	4
	Produksi Buah-Buahan		
	Produksi Durian	Ton	14.338,2
	Produksi Rambutan	Ton	6.270,2
	Produksi Jeruk Siam	Ton	7.992
	Produksi Pisang	Ton	2.457,2
	Produksi Manggis	Ton	25,9
	Produksi Duku	Ton	2.371,78
	Produktifitas Buah-Buahan		
	Produktifitas Durian	Ton/Ha	16,4
	Produktifitas Rambutan	Ton/Ha	6,2
	Produktifitas Jeruk Siam	Ton/Ha	5
	Produktifitas Pisang	Ton/Ha	4,5
	Produktifitas Manggis	Ton/Ha	2
	Produktifitas Duku	Ton/Ha	3
	Luas Tanam Sayur-Sayuran		
	Kangkung	Ha	125
	Bayam	Ha	132
	Kacang Panjang	Ha	225
	Tomat	Ha	180
	Kubis	Ha	4
	Wortel	Ha	3
	Bawang Merah	Ha	17
	Cabai	Ha	313
	Terung	Ha	176
	Produksi Tanaman Sayur-Sayuran		
	Kangkung	Ha	107,7
	Bayam	Ha	110,4
	Kacang Panjang	Ha	170,1
	Tomat	Ha	192,9
	Kubis	Ha	52
	Wortel	Ha	1
	Bawang Merah	Ha	15,4
	Cabai	Ha	278,7
	Terung	Ha	121,38
	Produktifitas Tanaman Sayur-Sayuran		
	Kangkung	Ton/Ha	3
	Bayam	Ton/Ha	2,6

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI TAHUN 2010
1	2	3	4
	Wortel	Ton/Ha	3
	Bawang Merah	Ton/Ha	3
	Cabai	Ton/Ha	2,5
	Terung	Ton/Ha	3,22
Meningkatnya Populasi Ternak	Populasi Ternak		
	Sapi	ekor	16.917
	Kerbau	ekor	6.138
	Kambing	ekor	6.823
	Ayam Buras	ekor	650
	Ayam Pedaging	ekor	150
	Ayam Petelur	ekor	72
	Itik	ekor	31
Meningkatnya Penggunaan Lahan Pertanian	Luas Lahan Sawah	Ha	23

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan berorientasi publik	Laporan Keuangan tepat waktu sesuai SAP	Tepat/tidak	Tepat
Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik	Status laporan kinerja kategori baik	A, B, C, D	D
Meningkatnya produksi dan produktifitas perkebunan	Luas areal perkebunan kakao	Ha	56.238,69
	Produksi perkebunan kakao	Ton	33.900,19
	Luas areal perkebunan kopi	Ha	1.257,25
	Produksi perkebunan kopi	Ton	323,795
	Luas areal perkebunan kelapa sawit	Ha	5.912,50
	Produksi perkebunan kelapa sawit		
Menurunnya luas hutan dan lahan kritis	Luas areal tanaman sagu	Ton	39.348,70
	Rehabilitasi Kawasan Hutan	Ha	1.587,00
Meningkatnya hasil hutan kayu dan non kayu	Luas Hutan Tanaman (HTR, HKm, HD)	Ha	47.068
	Pengembangan lebah madu	Ha	500

SATUAN POLISI POMONG PRAJA

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan berorientasi publik	Laporan Keuangan tepat waktu sesuai SAP	Tepat/tidak	tepat
Terwujudnya laporan kinerja	Status laporan kinerja kategori baik		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI TAHUN 2010
1	2	3	4
	Jumlah peralatan operasional yang layak pakai	unit	35
	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja dalam 10.000 Penduduk	Jumlah	
	Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	orang	23
	Jumlah aparat yang mengikuti orientasi kemampuan antar satuan se SulSel	orang	35
Meningkatnya pengamanan pejabat daerah, aset vital dan pos lalu lintas barang Kab. Luwu Utara	Jumlah pengamanan kunjungan kerja pejabat daerah	kali	48
	pengamanan aset vital daerah	aset	7
	pengamanan pos lalu lintas barang Kab. Luwu Utara	Pos Pengawasan	2
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan bahan hukum dalam melaksanakan peraturan daerah dan putusan	Jumlah penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah	Jenis Perda	8

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUH

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan berorientasi publik	Laporan Keuangan tepat waktu sesuai SAP	Tepat/tidak	tepat
Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik	Status laporan kinerja kategori baik	A, B, C, D	D
Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Ketersediaan energi dan protein per kapita	Kkal/ perkapita/ hari	2.051,9 50
	Penguatan cadangan pangan	Ton	8
Distribusi dan Akses Pangan	Ketersediaan info, pasokan, harga & akses pangan di daerah	Rp (%)	60
	Stabilitas harga dan pasokan pangan	Rp (%)	65
Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	PPH	65
	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Doc	1
Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah daerah rawan pangan yang diintervensi	Desa	6 Kec, 48 desa
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Prima dalam mendukung Kegiatan ketahanan pangan serta pengembangan dan pemantauan Ketahanan Pangan	Jumlah Pembinaan dan pengembangan ketersediaan cadangan dan kewaspadaan pangan	Kali	2
	Jumlah regulasi tentang keamanan pangan	Doc	1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI TAHUN 2010
1	2	3	4
Terlaksananya pengembangan ketahanan pangan di lahan kering	Jumlah kegiatan pengembangan pola pekarangan	Unit / %	20 unit/
Meningkatnya pembinaan pemantapan Kelembagaan Ketahanan Pangan	Tersedianya cadangan pangan daerah	Kali	35%
Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Peningkatan produksi dan Produktivitas Pertanian/Perkebunan berbasis teknologi tepat guna	Komoditi / Ton	1
Tersedianya programa penyuluhan pertanian yang mendukung 4 (empat) sukses pembangunan pertanian	Jumlah rekomendasi teknis tahunan	Doc	4
	Jumlah penyusunan programa penyuluh pertanian TK. Desa	Kali	16
	Jumlah penyusunan programa penyuluh pertanian TK. BP3K kecamatan	Kali	9
	Jumlah penyusunan programa penyuluhan tk. Kabupaten	Kali	1
	Jumlah penyusunan Musyawarah Tudang Sipulung Tk. Desa	Kali	10
	Jumlah penyusunan Musyawarah Tudang Sipulung Tk. Kecamatan	Kali	9
	Jumlah pelaksanaan Tudang Sipulung sektor wilayah Peralihan	Kali	-
	Jumlah kelompok tani yang dilatih	Orang	80
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan	Jumlah petani yang mengikuti kegiatan penyuluhan	Unit	9
Tersedianya sumber daya manusia pertanian (penyuluh dan petani) yang kompeten dalam jumlah dan mutu yang diharapkan	Jumlah ketersediaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan	Unit	9
	Jumlah penyuluh dan petani yang mempunyai kompetensi penerapan teknologi tepat guna spesifik lokasi	Cara	4
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan	Jumlah petani yang mengikuti kegiatan penyuluhan	orang	550
Tersedianya sumber daya manusia pertanian (penyuluh dan petani) yang kompeten dalam jumlah dan mutu yang diharapkan	Jumlah ketersediaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan	Orang	117
	Jumlah penyuluh dan petani yang mempunyai kompetensi penerapan teknologi tepat guna spesifik lokasi	Orang	-

RSUD ANDI DJEMMA MASAMBA

Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berorientasi	Laporan Keuangan tepat waktu sesuai SAP		
--	---	--	--

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI TAHUN 2010
1	2	3	4
Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik	Laporan kinerja kategori baik	A/B/C/D	D
Meningkatnya SDM dibidang pelayanan	Jumlah Dokter Spesialis	org	8
	Jumlah Bimtek Dokter Spesialis	kali	17
	Jumlah Bimtek Dokter Umum dan Dokter Gigi	kali	6
	Jumlah Bimtek Paramedis dan Non Paramedis	kali	73
	Average Length Of Stay (ALOS)	Hari	4.21
Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan	Presentase sarana dan prasarana kesehatan	%	70
	Bed Occupary Rate	%	81.11
	Bed Turn Over	Kali	63.8
	Turn Over Interval (TOI)	Hari	1.08
Meningkatnya manajemen pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Pasien	%	70
Meningkatnya informasi tentang pelayanan kesehatan yang transparan	Sistem Informasi Rumah Sakit (SIM RS)	unit	tidak
Menurunnya angka kematian pasien setelah dirawat	Net Death Rate (NDR)	%	9.4
	Gross Death Rate (GDR)	%	24.79
Meningkatnya status kesehatan lingkungan kesehatan RS yang sesuai standar kesehatan	Incenerator	unit	ada
	IPAL	Ada/ tidak	tidak
	Nilai Baku Mutu		
	- Suhu	°C	
	- Zat Padat Tersuspensi	mg/l	-
	- Biological Oxygen Demand (BOD)	mg/l	-
	- Ammonia (NH ₃)	mg/l	-
	- Fosfat (PO ₄ ³⁻)	mg/l	-
	- Pemeriksaan Nosokomial	kali	-
	- Pemeriksaan Sampel Air Minum	kali	-
	- Pemeriksaan Sampel Air Bersih	kali	-
	- Pemeriksaan Sampel Makanan	kali	-
	- Analisis Proteksi Radiasi	kali	-

DINAS PENDIDIKAN

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan berorientasi publik	Laporan Keuangan tepat waktu sesuai SAP	tepat/tidak	tepat
Terwujudnya laporan kinerja	Status laporan kinerja kategori baik		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI TAHUN 2010
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas manajemen penyelenggaraan pendidikan	Guru yang memenuhi kualitas S1/D4	Persen	54.57
	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	7.46
	Rasio guru dan murid SD/MI	Persen	28.67
	Rasio guru dan murid SMP/MTs	Persen	18.16
	Rasio guru dan murid SMU	Persen	12.09
Meningkatnya pelayanan pendidikan prasekolah dan pendidikan luar sekolah	Persentase jumlah anak usia dini yang bersekolah	Persen	21.81
	Meningkatnya angka melek huruf	Persen	92.36
	Penduduk berusia >15 tahun melek huruf	Persen	98.02
Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar	APM SD/MI	Persen	71.1
	Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	78.64
	Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	88.35
Meningkatnya pelayanan pendidikan menengah dan kejuruan	Angka partisipasi Murni SMA/SMA/MA	Persen	36.41
	APS usia 16-18 Tahun	Persen	55.74
Meningkatnya sarana dan prasarana untuk semua jenjang pendidikan berwawasan iman dan taqwa	Rasio ketersediaan RKB dan Murid SD/MI	Rasio	24
	Rasio ketersediaan RKB dan Murid SMP/MTs	Rasio	30
	Rasio ketersediaan RKB dan Murid SMA/SMK/MA	Rasio	34
Meningkatnya mutu pendidikan yang wawasan iman dan taqwa	Angka kelulusan SD/MI	Persen	100
	Angka kelulusan SMP/MTs	Persen	100
	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	Persen	100
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan berorientasi publik	- Laporan Keuangan tepat waktu sesuai SAP	tepat/tidak	tepat
	- Laporan Keuangan Kabupaten Kategori WTP	tepat/tidak	tepat
Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik	Status laporan kinerja kategori baik	A, B, C, D	D
Terwujudnya Administrasi Pemerintahan yang Tertib, Efisien dan Efektif	Status laporan kinerja baik	Nilai	C
Terwujudnya pengelolaan Keuangan	Laporan Keuangan tepat waktu sesuai		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI TAHUN 2010
1	2	3	4
Meningkatnya pelaksanaan manajemen akuntansi melalui sistem informasi keuangan daerah	SIMDA dan sistem Pengelolaan Keuangan	Ada	Ada
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur	Jumlah aparat yang mengikuti BIMTEK Pengelolaan Keuangan Daerah	Orang	100 Orang
Meningkatnya kualitas management asset dan manajemen akuntansi berbasis teknologi informasi (IT) sesuai SAP	SIMDA dan e-Audit	Ada	Ada
	Perda tentang APBD Pokok dan Perubahan	-	Tepat Waktu
	Perbup tentang penjabaran APBD	-	Tepat Waktu
Meningkatnya penerimaan pendapatan Daerah	Jumlah Pajak dan Retrebusi Daerah	Persen	
	Rasio PAD dan Retrebusi daerah	Persen	
	Rasio PAD terhadap total APBD	Persen	
	Rasio wajib pajak dan jumlah penduduk	Persen	

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan berorientasi publik	Laporan Keuangan tepat waktu sesuai SAP	tepat/tidak	tepat
Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik	Status laporan kinerja kategori baik	A, B, C, D	D
Meningkatnya kualitas Kinerja aparat KLH	- Jumlah aparat yang mengikuti Binbingan Teknis LH	Orang	0
Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan	- Jumlah usaha dan/atau kegiatan mentaati Persyaratan Administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	lokasi	1
	- Jumlah kawasan pemukiman atau industri sumber mata air yang dipantau mutu airnya	lokasi	1
	- Jumlah kegiatan/usaha yang telah mempunyai sistem pengelolaan limbah	lokasi	1
	- Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan Penduduk	%	0
Meningkatnya pengawasan dalam Pengelolaan SDA dan LH	- Jumlah personil operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan di TPA Meli	orang	3
	- Cakupan sarana dan prasarana laboratorium Lingkungan Hidup yang sesuai dengan standar ISO	%	5
	- Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan SPPL, UKL-UPL dan AMDAL	%	100%
Meningkatnya Perlindungan SDA dan LH	- Jumlah Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau	aduan	0
	- Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah yang produksi biomassa yang di informasikan	%	0

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI TAHUN 2010
1	2	3	4
Terwujudnya pelestarian SDA dan LH	- Jumlah RTH yang ditata	lokasi	0
	- Jumlah RTH yang dipelihara	lokasi	0
	- Luas lahan kritis, sekitar sumber mata air dan atau sempadan Sungai yang dikendalikan kerusakannya	Ha	0
	- Jumlah lokasi Hutan Mangrove yang direhabilitasi	lokasi	0
	- Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	Buku	2
	- Dokumen menuju Indonesia Hijau (MIH)	Buku	2
Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan SDA dan LH	- Jumlah Bank Sampah	lokasi	0
	- Jumlah Sekolah yang mengikuti program Adiwiyata	Sekolah	1
	Jumlah Kolompok Masyarakat yang memanfaatkan pengelolaan Limbah Organik menjadi Biogas masamba Kota Adipura	klp	0
		Piala	1
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan berorientasi publik	Laporan Keuangan tepat waktu sesuai SAP	Tepat/tidak	Tepat
Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik	Status laporan kinerja kategori baik	A, B, C, D	D
Meningkatnya sumber daya aparatur berbasis TI	Persentase aparatur yang menguasai TI	%	-
Meningkatnya alat komunikasi dan informasi berbasis teknologi	Persentase akses komunikasi dan informasi berbasis teknologi (KIM)	%	-
	Persentase desa yang dapat diakses telekomunikasi informasi	%	75
	Persentase penduduk yang dapat akses telekomunikasi dan informasi	%	65
	Persentase desa pintar	%	-
	Jumlah forum kelompok informasi masyarakat	Klp	0
Meningkatnya ketersediaan informasi yang valid, akuntabel dan transparan	Persentase ketersediaan informasi yang valid, akuntabel dan transparan (e-procurement dan website)	%	-
	Jumlah jaringan hotspot yang telah terkoneksi dengan internet	Lokasi	
	Jumlah kantor pemerintah di kecamatan yang telah terkoneksi dengan internet	Kec.	5
Meningkatnya sistem transportasi yang tertib, aman, nyaman dan lancar	Jumlah kasus pelanggaran lalu lintas	kasus	5
	Jumlah terminal	unit	-

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI TAHUN 2010
1	2	3	4
	Jumlah pembangunan dermaga mini	unit	0
	Jumlah pembangunan halte	buah	0
	Jumlah rambu lalu lintas yang terpasang	buah	7
	Panjang marka jalan yang terpasang	meter	650
	Panjang pagar pengaman jalan	meter	7500
	Jumlah warning yang terpasang	buah	0
	Jumlah portal yang terpasang	buah	4
	Jumlah bus sekolah	unit	6
	Jumlah RPPJ yang terpasang	buah	1
	Jumlah papan nama jalan yang terpasang	buah	31
	Jumlah kendaraan Patwal	unit	93
	Jumlah kendaraan BM	unit	1
	Jumlah rambu suar yang terpasang	unit	4
	Jumlah delinator yang terpasang	unit	0
	Jumlah pembangunan dermaga pembangunan rakyat munte	unit	0
	Jumlah speed boot	unit	0
	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	unit	0
Terwujudnya pelayanan publik yang cepat dan bermutu	Jumlah kendaraan sebelum dioperasikan wajib lulus uji laik jalan	unit	650
	Jumlah operasi penertiban kendaraan	unit	1481
	Jumlah penduduk yang menggunakan transportasi sungai, danau dan penyeberangan	org	45
	Jumlah perizinan bidang laut	izin	1448
	Jumlah pengukuran kapal motor dan perahu nelayan	kali	237
	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor	unit	3

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan berorientasi publik	Laporan Keuangan tepat waktu sesuai SAP	Tepat/tidak	tepat
Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik	Status laporan kinerja kategori baik	A, B, C, D	D
Terwujudnya tata penyelenggaraan politik dan pemerintahan yang baik	Jumlah ormas dan parpol yang terdaftar	Ormas	6
	Jumlah kegiatan pembinaan politik	Kegiatan	59
Meningkatnya pemahaman	Meningkatnya jumlah masyarakat		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI TAHUN 2010
1	2	3	4
	Jumlah kasus konflik kepengurusan ormas	kasus	
Terlaksananya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil	Persentase wajib pilih yang ikut dalam Pilkada	%	-
	Jumlah kasus sengketa Pilkada	kasus	-
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat	Jumlah kasus kriminalitas	kasus	1
	Rata-Rata kejadian ketentraman dan ketertiban	Kasus	1
Meningkatnya peran serta masyarakat untuk ikut menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah anggota Linmas yang terlatih	org	5
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan erah yang Akuntabel dan orientasi publik	Laporan Keuangan tepat waktu sesuai SAP	Tepat/tidak	Tepat
Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik	Status laporan kinerja kategori baik	A, B, C, D	D
Meningkatnya pemberdayaan tenaga kerja	Angka pengangguran	Orang	6,399
	Angka pengangguran pada usia 15-24 tahun	Orang	46,777
	Angka pengangguran terbuka	Orang	6,339
	Angka pengangguran pada penduduk usia 15 - 24 tahun	Orang	46777
	Rasio penduduk yang bekerja	Orang	124,319
	Persentase penduduk yang bekerja terhadap total penduduk	Jumlah	124,319
	Persentase angkatan kerja terhadap jumlah penduduk	persen	130,718
	Laju pertumbuhan angkatan kerja	persen	6,5
	Persentase penduduk produktif terhadap total penduduk	persen	76,12
	Angka partisipasi angkatan kerja	persen	65,42
	Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja	persen	4,98
	Angka ketergantungan	persen	1,284
	Jumlah permintaan tenaga kerja	persen	4,98
	Rasio jumlah tenaga kerja tersedia terhadap jumlah lowongan kerja	persen	4,98
Meningkatnya kesejahteraan sosial	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat saran dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	-
	Persentase Pelayanan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial	Persen	27,57% untuk 9Guru TPA) dan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI TAHUN 2010
1	2	3	4
	Persentase meningkatnya Kemandirian Kesejahteraan Sosial	Persen	0,37%AT,Pecat 1,10% dan 7 Kube Untuk Keluarga rentan
	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	16,25%
	Persentase lansia yang tinggal dirumah jompo dibandingkan dengan jumlah total lansia	Persen	-
	Persentase anak-anak dan remaja yang tinggal dirumah penampungan sosial dibandingkan dengan jumlah total anak-anak dan remaja	Orang	13,02%
	Persentase mantan pengguna narkoba yang sudah tidak lagi mengkonsumsi narkoba	Persen	4
	Persentase mantan penghuni penampungan sosial yang telah mampu hidup mandiri	Panti	-
	Jumlah panti sosial swasta yang mendapat pembinaan pemerintah	Panti	11 Panti
	Jumlah panti sosial yang dikelola swasta	Panti	11 Panti
	Jumlah rumah ibadah yang diberikan bantuan	Jumlah	-
	Jumlah lembaga keagamaan yang diberikan pembinaan	Jumlah	1
Meningkatnya pembinaan hubungan industrial	Angka sengketa pengusaha dengan Pekerja	Jumlah	-
	Persentase Kejadian unjuk rasa yang berkaitan dengan masalah ketenaga	Persen	-
	Jumlah pembinaan terhadap perusahaan	Jumlah	120
Meningkatnya pengawasan ketenaga kerjaan	Persentase perusahaan per Kecamatan yang disosialisasi	Persen	50%
Meningkatnya pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	Jumlah pembangunan kawasan transmigrasi.	UPT	1 UPT
	Jumlah pengembangan kawasan transmigrasi	UPT	1 UPT
Meningkatnya kualitas pemukiman masyarakat miskin	Jumlah pemukiman masyarakat miskin	Jumlah	25 Unit Tidak Layak Huni dan 41 Kk Korban Kebakaran
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi Publik	Laporan Keuangan tepat waktu sesuai SAP	Tepat/tidak	Tepat
Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik	Status laporan Kinerja kategori baik	A, B, C, D	D
Terwujudnya Profesionalisme aparat perencanaan di Bappeda	Jumlah aparat perencanaan yang mengikuti Bimtek Perencanaan	Orang	5 Orang
Terwujudnya perencanaan terpadu, terukur dan realistis melalui koordinasi dan keterpaduan antar	Dokumen perencanaan yang berbasis teknologi informasi	Dokumen	-
	Dalam perencanaan RKPD yang telah		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI TAHUN 2010
1	2	3	4
	Dokumen perencanaan RPJPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati	Dokumen	ADA
	Dokumen Perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Dokumen	ADA
	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	%	80%
	Penetapan KUA/PPAS tepat waktu	Tepat/Tidak	tepat
Berkembangnya Pusat-Pusat Penelitian dan Inovasi	Jumlah penelitian terapan, Jumlah Penelitian Unggulan	Unit	2
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah kelompok masyarakat yang ikut Musrebang	Kolompok	5
Terwujudnya Keterpaduan pemanfaatan ruang wilayah	Persentase Ketaatan pelaksanaan rencana tata ruang wilayah	%	-
	Peraturan Perundang-undangan yang mengakomodasi perencanaan tata ruang	Jumlah	Perda
	Persentase penggunaan tata ruang sesuai dengan perencanaan/peruntukan	%	-
	Jumlah peserta sosialisasi tata ruang		-

BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi Publik	Laporan Keuangan tepat waktu sesuai SAP	Tepat/tidak	Tepat
Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik	Status laporan Kinerja kategori baik	A, B, C, D	D
Terwujudnya kapasitas dan profesionalisme aparatpemerintah daerah	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	145
Terlaksananya sistem rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel	Jumlah CPNS yang memiliki kualitas sesuai dengan formasi yang dipersyaratkan	Orang	236
Terwujudnya calon pejabat yang kualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Org	80
Terwujudnya disiplin aparat pemerintah daerah	Menurunnya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Org	0
Terwujudnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Sistem informasi Kepegawaian	Ada/ Belum ada	Ada
	Tingkat Kepuasan PNS dalam pelayanan Admnistrasi Kepegawaian	Persen	0

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi Publik	Laporan Keuangan tepat waktu sesuai SAP	Tepat/tidak	Tepat
Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh	Status laporan Kinerja kategori baik	A, B, C, D	D

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI TAHUN 2010
1	2	3	4
Berkembangnya silidaritas, kerjasama dan kemitraan antar kolompok masyarakat	Jumlah kegiatan bersama antar kolompok masyarakat	Jumlah	1000
Meningkanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase masyarakat yang ikut dalam musrembang	%	50
Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintahan	Persentase kualitas SDM aparat BPMPD	%	30
Meningkatnya kualitas SDM aparat BPMD	Persentase kualitas aparat BPMD	%	40
Meningkatnya kualitas pelayanan aparat desa dan kelurahan	Persentase pelayanan aparat desa/kelurahan	%	35
Meningkatnya jumlah aparat desa yang memiliki skill/kemampuan pengoperasian komputer	Persentase aparat desa yang skill/kemampuan pengoperasian komputer	%	15
Meningkatnya disiplin aparat desa/kelurahan dalam melaksanakan tugas	Persentase disiplin aparat desa dan kelurahan	%	10
Meningkatnya etos kerja dan produktifitas aparat desa/kelurahan	Persentase meningkatnya etos kerja dan produktifitas	%	20
Meningkatnya efektivitas fungsi dan peran LKMD	Persentase fasilitasi tugas dan fungsi LKMD	%	5
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan melalui wadah LKMD	Jumlah masyarakat yang aktif dalam kegiatan gotong royong melalui wadah LKMD	Jumlah	10.000
Meningkatnya fungsi BPD sesuai dengan PP 72 Tahun 2005 dan Perda Nomor 8 Tahun 2007	Persentase Kepala Desa, Bendahara dan BPD yang terlatih	%	30
Meningkatnya koordinasi dan harmonisasi antara BPD dengan Kepala Desa	Persentase koordinasi dan harmonisasi antar BPD dengan Kepala Desa	%	
Teridentifikasi penurunan persentase jumlah keluarga miskin	Persentase penurunan jumlah keluarga miskin	%	
Meningkatnya jumlah keluarga yang dapat mengembangkan usaha/ industri rumah tangga	Jumlah keluarga yang mengembangkan usaha/ industri rumah tangga	Jumlah	25
Meningkatnya jumlah desa dan kelurahan yang memiliki data potensi yang akurat	Jumlah desa yang memiliki data potensi yang akurat	Jumlah	-
Tersusunnya RPJMD Desa berdasarkan data potensi yang akurat	Jumlah desa yang telah menyusun RPJM-Desa berdasarkan data potensi yang akurat	Jumlah	100
Meningkatnya jumlah desa dan kelurahan yang mencapai tingkat perkembangan dari kurang berkembang, lamban berkembang, berkembang, cepat berkembang	Jumlah desa/kel yang mencapai tingkat perkembangan dari kurang berkembang, lamban berkembang, berkembang, cepat berkembang	Jumlah	-
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi Publik	Laporan Keuangan tepat waktu sesuai SAP	Tepat/tidak	Tepat
Terwujudnya laporan kinerja	Status laporan Kinerja kategori baik		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI TAHUN 2010
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas produk industri kecil menengah yang berbahan baku local	Persentase rata-rata peningkatan kualitas produk IKM yang berbahan baku lokal	%	35
Meningkatnya perlindungan konsumen terhadap penggunaan barang kadaluarsa	Jumlah barang kadaluarsa yang ditarik dipasaran	Jumlah	20
	Jumlah peralatan UTP yang ditera	Jumlah	300
Berkembangnya industri pengolahan yang berbasis pertanian, perikanan dan kelautan	Jumlah industri pengelolaan yang berbasis pertanian, perikanan dan kelautan	Jumlah	792
Meningkatnya kompetensi para pengusaha industri kecil dan menengah	Jumlah pengusaha industri kecil menengah yang memiliki kompetensi	Jumlah	1304
Meningkatnya jumlah para partisipasi dunia usaha dalam menumbuh kembangkan UMKM	Persentase peningkatan partisipasi dunia usaha dalam menumbuh kembangkan UMKM	%	50
Meningkatnya fungsi koperasi sebagai lembaga pembiayaan bagi petani	Jumlah koperasi yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan bagi petani	Jumlah	213
	Jumlah Koperasi yang Aktif	Jumlah	96
	Jumlah anggota koperasi yang aktif	Jumlah	256
Tumbuh dan berkembangnya usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang tumbuh dan berkembang	Jumlah	8000
	Jumlah produk UMKM yang dipromosikan	Jumlah	5
Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi			
	Jumlah pasar tradisional yang terbangun	Jumlah	1
Meningkatnya jaringan dan informasi pasar	Jumlah jaringan informasi pasar	Jumlah	0
	Jumlah paket Pasar murah	Jumlah	300
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH			
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan orientasi publik	Laporan Keuangan tepat waktu sesuai SAP	Tepat/tidak	Tepat
Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik	Status laporan kinerja kategori baik	A, B, C, D	D
Meningkatnya minat baca pelajar dan masyarakat	Jumlah pengunjung dan peminjam buku perpustakaan	Orang	5,351
Meningkatnya ketersediaan bahan pustaka perpustakaan umum	Jumlah Bahan Pustaka	Jumlah	5,509
	Jumlah ragam bahan pustaka (koleksi)	Jumlah	1
Meningkatnya sarana dan prasarana layanan perpustakaan dan arsip	Jumlah gedung kantor perpustakaan dan arsip	Jumlah	0
	Jumlah prasarana perpustakaan dan arsip	Jumlah	53
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pengelola perpustakaan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis perpustakaan	Jumlah	50

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI TAHUN 2010
1	2	3	4
Meningkatnya ketersediaan bahan perpustakaan	Jumlah bahan pustaka perpustakaan desa	Jumlah	0
	Jumlah ragam bahan pustaka perpustakaan desa	Jumlah	-
Meningkatnya jumlah instansi pemerintah mengelola dan menata arsip secara baku	Jumlah SKPD yang menerapkan arsip secara baku	Jumlah	5
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya pengelola arsip pada instansi pemerintah	Jumlah pengelola arsip pemerintah yang profesional	Orang	0

KANTOR LATIHAN KERJA

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan berorientasi publik	Laporan Keuangan tepat waktu sesuai SAP	Tepat/tidak	Tepat
Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik	Status laporan kinerja kategori baik	A, B, C, D	C
Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang berkualitas dan produktifitas.	Rasio tenaga kerja terampil dibandingkan tenaga kerja tidak terampil	%	
	Rasio tenaga kerja terdidik dibandingkan tenaga kerja tidak terdidik	%	
	Rasio jumlah tenaga kerja tersedia terhadap jumlah lowongan kerja	Jumlah	
	Jumlah permintaan tenaga kerja	Jumlah	
Prospek Kesempatan kerja	Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja	%	
Meningkatnya Inovasi Masyarakat dan daerah dibidang teknologi tepat guna	Jumlah teknologi tepat guna Inovasi tepat guna	Jumlah	

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan berorientasi publik	Laporan Keuangan tepat waktu sesuai SAP	Tepat/tidak	Tepat
Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik	Status laporan kinerja kategori baik	A, B, C, D	C
Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat dan bermutu	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	
	Jumlah hari kerja dalam penyelesaian izin usaha	Jumlah	
	Jumlah hari kerja dalam melayani keluhan	Jumlah	
	Terimplementasikan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE)		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI TAHUN 2010
1	2	3	4
	Jumlah Pelayanan Perizinan dan non perizinan Bidang Penanaman Modal melalui PTSP di Bidang Penanaman Modal yaitu : Pendaftaran Penanaman Modal Dalaam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal dalam Negeri, tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin memperkerjakan tenaga kerja Asing (IMTA), yang bekerja di 1 (Satu) Kabupaten, sesuai kewenangan Pemerintrah Kabupaten (SPM)	Jumlah	
Meningkatnya pelaku usaha melakukan kegiatan usaha	Nilai Investasi PMDN (Rp.000)		
	Terselenggaranya fasilitasi pemda dalam rangka kerjasama kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) tk, kab. Dengan pengusaha tk.Provinsi/Nasional		
	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan		
	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal		
Terciptanya ketertiban dan Keteraturan dalam Dunia Investasi	Jumlah pengaduan permasalahan izin dan usaha dalam terselesaikan pertahun	Jumlah	
	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal Kepada Masyarakat dunia usaha	Jumlah	
	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal Kepada Masyarakat dunia usaha	Jumlah	

INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan berorientasi publik	Laporan Keuangan tepat waktu sesuai SAP	Tepat/tidak	Tepat
Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik	Status laporan kinerja kategori baik	A, B, C, D	C
Terwujudnya tertib administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	- Persentase jumlah wajib KTP	Jumlah	
	- Prosentase jumlah penduduk yang memiliki KK	Jumlah	
	- Prosentase penduduk memiliki akta kelahiran	Jumlah	
	- Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk	Jumlah	
	- Prosentase jumlah penduduk memiliki akta perkawinan & akta lain	Jumlah	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI TAHUN 2010
1	2	3	4
Tersedianya Data base kependudukan yang valid dan berkelanjutan	Prosentase data kependudukan yang valid	Jumlah	
Meningkatnya kemampuan aparat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya	- Prosentase Sumber daya - Aparatur yang profesional		
Meningkatnya sarana dan prasarana administrasi pelayanan	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana administrasi sistem pelayanan	%	
Meningkatnya koordinasi, Integrasi dan Singkronisasi dengan interaksi terkait	Prosentase, efisiensi dan efektifitas pelayanan kependudukan	%	
Terwujudnya pengelolaan kependudukan dan catatan sipil yang berbasis teknologi informasi	Prosentase pengelolaan kependudukan dan catatan sipil yang berbasis teknologi	%	

SEKRETARIAT DPRD

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi publik	Laporan Keuangan tepat waktu sesuai SAP	Tepat/tidak	Tepat
Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik	Status laporan kinerja kategori baik	A, B, C, D	C
Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan kegiatan Sidang/Rapat DPRD	Jumlah rancangan peraturan daerah yang dibahas dan ditetapkan	Jumlah	12 Perda
	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah	75 Kali
	Jumlah rapat-rapat paripurna	Jumlah	20 Kali
	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah	100 Kali
	Jumlah hearing/dialog yang dilaksanakan	Jumlah	3 Kali
	Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan	Jumlah	50 Kali
	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	Jumlah	Tepat Waktu
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Laporan keuangan tepat waktu sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAP)		3 Bimtek
Meningkatkan disiplin aparatur	Persentase peningkatan kualitas disiplin aparatur	%	80%
Meningkatnya kualitas penyusunan naskah-naskah keputusan DPRD	Jumlah naskah-naskah keputusan DPRD dan Keputusan pimpinan DPRD yang dihasilkan	Jumlah	15 Keputusan

DINAS PEKERJAAN UMUM

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi publik	Laporan Keuangan tepat waktu sesuai SAP	Tepat/tidak	tepat
Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang	Status laporan kinerja kategori baik		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI TAHUN 2010
1	2	3	4
Tersedianya Infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	%	55
Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana pemerintahan	Prosentase infrastruktur sarana pemerintahan yang terbangun	%	57
Terwujudnya sanitasi lingkungan yang baik	Prosentase rumah tinggal yang bersanitasi	%	55
Terwujudnya peningkatan, pengembangan pengelolaan jaringan irigasi, rawa	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	33
Tersedianya sarana air bersih	Rumah tangga pengguna air bersih	%	55
Terwujudnya peningkatan pengembangan kinerja pengelolaan sampah	Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk dalam Ibukota Kabupaten	%	55
Terwujudnya pembangunan drainase dan gorong-gorong	Persentase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat	%	60
Lingkungan sehat perumahan dan permukiman	Berkurangnya luasan permukiman kumuh	%	0.56
Terwujudnya standar bangunan sesuai SNI	Tersedianya pedoman harga standar bangunan negara di Kabupaten/Kota	Ada/tidak ada	ada
Terwujudnya pengawasan dan pemanfaatan ruang	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	%	14.45

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan berorientasi publik	Laporan Keuangan tepat waktu sesuai SAP	Tepat/tidak	Tepat
Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik	Status laporan kinerja kategori baik	A, B, C, D	C
Meningkatnya kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Jumlah IUP yang ditertibkan	Jumlah	30 IUP
Berkurangnya jumlah kegiatan pertambangan tanpa izin berkurang	Luas penambangan liar yang ditertibkan	Lokasi	45 Lokasi
	Luas areal penambangan liar	%	71,94%
Meningkatnya Rasio Elektrifikasi (RE) ketenagalistrikan	Persentase KK dengan akses listrik	%	78,61% 136 Desa
	RE ketenagalistrikan Per Desa	Unit	42 Unit
Meningkatnya data dan informasi geologi serta pemenuhan air bawah tanah	Jumlah KK/Desa pengguna air bawah tanah	Jumlah	135 KK

SEKRETARIAT DAERAH

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan berorientasi publik	Laporan Keuangan tepat waktu sesuai SAP	Tepat/tidak	Tepat
Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik	Status laporan kinerja kategori baik	A, B, C, D	D
Terwujudnya profesionalisme PNS Sekretariat Daerah	Rasio lulus S2	Jumlah	5%
	Rasio lulus S1	Jumlah	30%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI TAHUN 2010
1	2	3	4
	Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun	%	95%
	Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan Tugas yang menjadi tanggung Jawabnya	%	30%
Terwujudnya administrasi pemerintahan yang akuntabel dan transparan melalui pelaksanaan koordinasi	Jumlah sistem informasi manajemen Pemda yang dibuat	Jumlah	2
	Kategori laporan penyelenggaraan pemerintahan (LPPD)		Baik
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum yang baik dan bersih	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	75%
	Jumlah LHP yang ditindaklanjuti	Jumlah	10
	Jumlah Perda yang diusulkan		66 hari kerja
	Waktu rata-rata penyelesaian Perda	-	-
	Jumlah telaahan dan kajian hukum yang disampaikan kepada Bupati/ DPRD	Jumlah	150
	Jumlah peserta sosialisasi hukum dan peraturan perundang- undangan	Jumlah	-
	Jumlah Perda yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi	Jumlah	-
	Jumlah Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum	Jumlah	2
	Jumlah pengaduan masyarakat tentang pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti	%	50%
	Persentase pengaduan masyarakat tentang pelanggaran hukum	Jumlah	2
	Persentase permasalahan HAM yang dapat diselesaikan	Jumlah	50%
Terjaminnya kapasitas hukum dalam kepemilikan tanah aset pemerintah daerah	Jumlah aset yang disertifikasi	Jumlah	15 persil
Tertibnya batas wilayah dan batas antar daerah	Jumlah tapal batas yang disepakati	Jumlah	2
	Jumlah tapal batas kecamatan yang ditegaskan	Jumlah	1
Terwujudnya ketatalaksanaan dan kelembagaan yang efektif dan efisien	Persentase penerapan SOP	-	-
	Jumlah Perbup tupoksi SKPD	Jumlah	47
	Jumlah Perbup tata naskah dinas	Jumlah	1
	Kajian organisasi perangkat daerah	-	-
Terwujudnya pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang optimal	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerumahtanggaan	%	85%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI TAHUN 2010
1	2	3	4
BADAN KB & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan berorientasi publik	Laporan Keuangan tepat waktu sesuai SAP	Tepat	Tepat
Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik	Status laporan kinerja kategori baik	A, B, C, D	D
Meningkatnya pelayanan komunikasi informasi dan edukasi keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 Tahun sebesar 3,5% pada tahun 2014	%	4
	Cakupan sarana pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif sebesar 65% pada tahun 2014	%	-
	Cakupan PUS yang ingin ber KB yang tidak terpenuhi (Umnet Need) sebesar 50% pada tahun 2014	%	79
	Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB sebesar 70% pada tahun 2014	%	29
	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB Mandiri sebesar 10% pada tahun 2014	%	50
	Ratio penyuluh KB/Petugas Lapangan KB I PKL / PLKB untuk disetiap 1 desa/kel pada tahun 2014	4 Desa/Kel	10
	Ratio petugas pembantu pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan 1 PPKBD pada tahun 2014	1 Desa/ 1 PPKBD	3-Jan
	Persentase keluarga dengan jumlah anak < 3	%	1-Jan
	Persentase PUS menggunakan Alkon	%	12.6
	Persentase pria usia subur dalam menggunakan alkon	%	71.8
Tersedianya alat dan obat kontrasepsi	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 30% pertahun	%	4.5
Tersedianya informasi data mikro	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa sebesar 100% pada tahun 2014	%	10
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu 100%	org	100
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu terlaksana KTP/A dan PPT/PKT dirumah sakit	org	1
	Cakupan layanan rehabilitasi sosial		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI TAHUN 2010
1	2	3	4
	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	org	1
Meningkatnya peran gender dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	org	1
	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	org	1
	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	org	1
	Persentase perempuan dilembaga pemerintahan	org	1
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kec	11

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan berorientasi publik	Laporan Keuangan tepat waktu sesuai SAP	Tepat	Tepat
Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik	Status laporan kinerja kategori baik	A, B, C, D	D
Berkembangnya pusat produksi, dan pusat layanan jasa dan pariwisata di setiap desa/kelurahan dan kecamatan	Jumlah komoditas unggulan	Jumlah	
Berkembangnya jasa wisata	Jumlah wisatawan	Jumlah	
	Angka pertumbuhan nilai tambah sektor pariwisata	%	
Meningkatnya pendapatan masyarakat khususnya para pelaku wisata di sektor pariwisata	Angka pertumbuhan pendapatan pelaku usaha di sektor pariwisata per tahun	%	
Meningkatnya pendapatan daerah	Angka pertumbuhan penerimaan pajak dan retribusi dari usaha pariwisata per tahun	%	
	Jumlah kebijakan nasional yang telah ditindaklanjuti	%	
	Jumlah kegiatan olahraga massal dalam 1 bulan	Jumlah	
	Persentase kecamatan yang mempunyai sarana olahraga untuk umum	Unit	
	Jumlah organisasi pemuda	Jumlah	
	Jumlah kegiatan kepemudaan	Jumlah	
	Jumlah kegiatan olahraga	Jumlah	
	Persentase cabang olahraga yang	%	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI TAHUN 2010
1	2	3	4
	Persentase rekor nasional yang dikuasi atlet daerah	%	
	Jumlah atlet daerah yang dikirim ke event olahraga di luar negeri	Jumlah	
	Jumlah organisasi olahraga	Jumlah	
	Jumlah club olahraga	Jumlah	
	Jumlah gedung olahraga	Jumlah	
	Jumlah gedung kesenian aktif	Jumlah	
	Jumlah gedung kesenian	Jumlah	
	Jumlah kegiatan pertunjukan kebudayaan	Jumlah	
	Kelompok kebudayaan yang diberikan pembinaan	%	

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH





Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi publik	Laporan Keuangan tepat waktu sesuai SAP	Tepat/tidak	Tepat
Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik	Status laporan kinerja kategori baik	A, B, C, D	D
Berkurangnya dampak/resiko bencana terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah dampak bencana areal pertanian, perkebunan, perikanan dan permukiman	Ha	
	Persentase kerusakan pantai dan laut	%	
	Persentase tingkat kelestarian SDA dan lingkungan hidup	%	
Meningkatnya penyebaran informasi penanggulangan bencana	Persentase penyebaran informasi penanggulangan bencana	%	
Tersedianya sistem peringatan dini bahaya	Jumlah sistem peringatan dini bahaya bencana	unit	
Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Jenis/unit	
Meningkatnya kerjasama antar instansi terkait, masyarakat dan dunia usaha dalam upaya penanggulangan bencana	Persentase kerjasama antar instansi terkait dalam penanganan bencana	%	
	Persentase keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan bencana	%	
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan standar operasional prosedur penanggulangan bencana	Persentase peningkatan kapasitas aparatur dalam penanggulangan bencana	%	50
Meningkatnya peran dan kesadaran masyarakat, dunia usaha dan lembaga sosial kemasyarakatan dalam upaya penanggulangan bencana	Persentase partisipasi masyarakat, dunia usaha dan lembaga sosial kemasyarakatan dalam upaya penanggulangan bencana	%	25

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI TAHUN 2010
1	2	3	4
Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik	Status laporan kinerja kategori baik	A, B, C, D	D
Meningkatnya kualitas pelaksanaan program dan kegiatan	Meningkatnya profesionalisme aparat pengawasan	Jumlah	
	Meningkatnya peningkatan teknis aparat pengawasan	Jumlah	
Meningkatnya pembinaan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah hasil pelaksanaan pengawasan komprehensif	Jumlah	
	Jumlah hasil pelaksanaan pemeriksaan khusus perintah pimpinan	Jumlah	
	Jumlah hasil pelaksanaan pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Desa	Jumlah	
	Jumlah hasil penanganan kasus pengaduan kepegawaian	Jumlah	
	Jumlah hasil penanganan kasus pengaduan masyarakat	Jumlah	

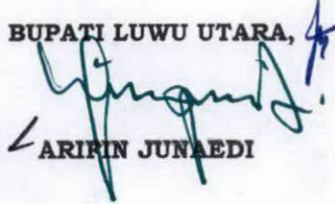
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan berorientasi publik	Laporan Keuangan tepat waktu sesuai SAP	Tepat/tidak	tepat
Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik	Status laporan kinerja kategori baik	A, B, C, D	C
Meningkatnya jumlah infrastruktur fisik prasarana perikanan budidaya dan usaha perikanan tangkap	Panjang irigasi tambak yang berfungsi maksimal	Meter	30,000
	Panjang irigasi air tawar yang berfungsi maksimal	Meter	-
	Panjang jalan produksi yang terbangun	Meter	10,000
Meningkatnya produksi dan tingkat produktivitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta terciptanya lapangan kerja dan iklim usaha perikanan yang kondusif	Jumlah produksi perikanan tangkap laut	Ton	200.4
Meningkatnya produksi dan tingkat produktivitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta terciptanya lapangan kerja dan iklim usaha perikanan yang kondusif	Jumlah produksi budidaya ikan air tawar	Ton	450
	Jumlah produksi perikanan tangkap perairan umum	Ton	7,106.50
	Jumlah produksi perikanan budidaya udang	Ton	1,221.46
	Jumlah produksi perikanan budidaya ikan bandeng	Ton	8,180.31
	Jumlah produksi budidaya ikan air tawar	Ton	29,420.80

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI TAHUN 2010
1	2	3	4
	Luas lahan budidaya air payau	Ha	15.23
	Luas lahan budidaya laut	Ha	4.45
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat pesisir melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir		Orang	367
	Konsumsi Ikan	%	98
	Pendapatan rata-rata pembudidaya	Rp	800,000
Terwujudnya pengendalian sumber daya hayati perairan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat pesisir	Jumlah kasus pelanggaran/ pengrusakan sumberdaya kelautan (ilegal fishing, pengrusakan terumbu karang, bakau, mangrove dan eksploitasi di luar aturan yang berlaku	Kasus	0

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,


ARIRIN JUNAEDI